BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 7.B / KPTS / I / 2022

TENTANG

RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DAN SATUAN TUGAS PELAKSANA RENCANA AKSI TAHUN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa guna mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta dalam rangka mendukung Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, perlu disusun Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi;

b. bahwa agar pelaksanaan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dapat berjalan secara terkoordinasi dan terarah, perlu dibentuk Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang –undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 Tentang pembentukan Daerah–daerah Swantantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swantantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahunn Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staff Kepresidenan Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 115/M.PPN/HK/12/2020, Nomor 119/8774/SJ, Nomor 15 Tahun 2020, Nomor NK-03/KSK/10/2018 Tanggal 19 Oktober 2018 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas Pelaksana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan Sebagimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang telah ditetapkan.
b. Memastikan pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi agar tetap dilaksanakan sesuai target capaian yang telah ditetapkan.
c. Menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi kepada Bupati dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim Pelaksana Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekertaris Daerah.	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	
Kepala BPKD	
Kabag Hukum & Orgs.	

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
2. Yth. Inspektur Ispektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 7.B / KPTS / I / 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI

1) Perencanaan dan Penganggaran

NO	OPD/SKPD	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	BPKD BAG.HUKUM	STANDAR SATUAN HARGA (SSH)	- Penetapan SSH - Implementasi SSH
2	BP3D BPKD ULP DINAS PU	ANALISA STANDAR BIAYA (ASB)	- Penetapan ASB dan HSPK - Kesesuain SSH & ASB/HSPK dan Implementasi ASB/HSPK
3	BPKD SETWAN DISKOMINFO	PENGANGGARAN APBD	- Penyampaian Rancangan KUA PPAS - Kesepakatan Rancangan KUA PPAS - Penyerahan RAPBD - Publikasi APBD
4	INSPEKTORAT BP3D BPKD	PENGAWASAN	- Tindak lanjut Reviu RKPD - Tindak Lanjut Reviu SSH, ASB

2) Pengadaan Barang dan Jasa

NO	OPD/SKPD	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	ULP BKD	SDM UKPBJ	- Pokja UKPBJ Permanen - Ketersediaan SDM UKPBJ - Ketersediaan Fungsional PBJ
2	ULP	PELAKSANAAN TUPOKSI	- Reviu Perencanaan PBJ - Vendor Management System - Evaluasi Kegiatan PBJ - Advokasi PBJ
3	ULP Bag. Hukum	PERANGKAT PENDUKUNG	- Kode Etik PBJ - SOP PBJ - TPP Khusus UKPBJ
4	ULP	Penayangan Sirup	% Penayangan Sirup
5	ULP INSPEKTORAT	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN	- Reviu HPS - Tindak lanjut reviu Tata kelola PBJ

3) Perizinan

NO	OPD/SKPD	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	BP3D DPMPTSP Bag. Hukum	REGULASI	- Regulasi daerah mengenai tata ruang - Regulasi pendelegasian kewenangan perizinan - Regulasi Daerah tentang tata kelola perizinan
2	Bag. Hukum DPMPTSP	INFRASTRUKTUR PERIZINAN	- Sistem Perizinan Online Daerah - Lokasi dan Tempat Layanan - Media Publikasi
3	DPMPTSP Inspektorat	PENGENDALIAN & PENGAWASAN	- Pengawasan - Tindak lanjut reviu Tata kelola perizinan & Non perizinan - Indeks Kepuasan masyarakat

4) Pengawasan Apip

NO	OPD/SKPD	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	Inspektorat	KAPABILITAS APIP	- Kecukupan SDM - Ketersediaan Anggaran - Penilaian Kapabilitas APIP - Independensi dan Objektivitas APIP - Penjaminan kualitas pengawasan
2	Inspektorat	KEGIATAN PENGAWASAN	- Kinerja rutin pengawasan - Pengawasan prioritas nasional - Implementasi audit berbasis resiko
3	Inspektorat	PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH	- Evaluasi SPIP - Tingkat Maturitas SPIP - Penanganan Pengaduan - Rencana pengendalian kecurangan (fraud control plan)
4	Inspektorat	TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DAN EKSTERNAL	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal
5	Inspektorat	KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA	- Pemeriksaan khusus - Probity Audit - Reviu tata kelola

5) Manajemen ASN

NO	OPD/SKPD	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	BKD Bag. Hukum Inspektorat	REGULASI MANAJEMEN ASN	- Perkada Manajemen ASN - SK Kada Manajemen ASN
2	BKD Inspektorat	SISTEM INFORMASI	Sistem Informasi Manajemen ASN
3	Inspektorat Bag. Hukum	KEPATUHAN LHKPN & PENGENDALIAN GRATIFIKASI	- Kepatuhan LHKPN - Pengendalian Gratifikasi
4	Bag. Hukum BKD Inspektorat BP3D	TATA KELOLA ASN	- Evaluasi Jabatan - Tambahan Penghasilan Pegawai - Promosi, Rotasi, Mutasi - Manajemen kinerja individu - Penilaian system Merit - Penegakkan kode etik dan perlindungan & pelayanan pegawai
5	BKD Inspektorat	PENCEGAHAN JUAL BELI JABATAN	- Evaluasi rencana pengadaan, promosi, rotasi, dan mutasi ASN - Evaluasi benturan kepentingan

6) Optimalisasi Pajak daerah

NO	OPD/SKPD	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	BPKD Bag. Hukum	REGULASI PAJAK DAERAH	Kelengkapan Regulasi Pajak Daerah
2	BPKD	DATA BASE PAJAK DAERAH	- Data Potensi Pajak Daerah - Data Tunggakan Pajak Daerah
3	BPKD	PENINGKATAN INOVASI PAJAK	- Usulan Inovasi Pajak Daerah - Laporan Capaian Hasil Inovasi Pajak Daerah
4	BPKD	PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK	Capaian Penagihan Tunggakan Pajak Daerah

5	BPKD	PENINGKATAN PAJAK	Capaian Peningkatan Pajak Daerah
6	BPKD Inspektorat	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN	- Pemeriksaan Pajak Daerah - Tindak Lanjut Review Tata Kelola Pajak Daerah

7) Manajemen Aset Daerah

NO	OPD/SKPD	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	BPKD Bag. Hukum	REGULASI BMD	Kelengkapan Regulasi BMD
2	BPKD	PENATAUSAHAAN BMD	- Data Base BMD - Rekonsiliasi BMD - Inventarisasi BMD
3		PENGAMANAN HUKUM	- Pendanaan dan Pendaftaran Sertifikt BMD - Legalisasi BMD
4		PENERTIBAN BMD	Penertiban BMD
5		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN	- Pakta Integritas BMD - Tindak Lanjut Review Tata Kelola BMD

8) Tata Kelola Keuangan Desa

NO	OPD/SKPD	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	DPMD	REGULASI	Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa
2	DPMD	PUBLIKASI	- Publikasi APBdes - Publikasi pertanggung jawaban APBDes
3	DPMD	Sistem Keuangan Desa	Siskeudes Online
4	DPMD	LAPORAN KONSOLIDASI	Laporan konsolidasi APBDes
5	DPMD Inspektorat	PENGAWASAN	- Audit Keuangan Desa - Database Aset Desa - Mekanisme pengawasan masyarakat

PEJABAT	PARAF
Sekertaris Daerah.	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	
Kepala BPKD	
Kabag Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 7.B / KPTS / I / 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI

I.	Pengarah	: 1. Bupati Halmahera Barat 2. Wakil Bupati Halmahera Barat
II.	Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah Halmahera Barat
III.	Ketua	:Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Halbar
IV.	Wakil Ketua	: Inspektur Inspektorat Kab. Halbar
V.	Sekretaris	: Kepala BPKD Kab. Halbar
VI.	Wakil Sekretaris	: Kepala Bagian Hukum & Organisasi Setda Kab. halbar
VII.	Admin MCP Kabupaten	: Irban IV Inspektorat
VIII.	Kelompok Kerja Perencanaan :	
	Ketua	: Kepala BP3D Kab. Halbar
	Anggota	: Sekretaris BP3D Kab. Halbar
IX.	Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa :	
	Ketua	: Kepala Bagian ULP Kab. Halbar
	Anggota	: Staf ULP
X.	Kelompok Kerja Penganggaran, Manajemen Aset Daerah dan Optimalisasi Pajak Daerah :	
	Ketua	: Sekretaris BPKD Kab. Halbar
	Anggtota	: 1. Kepala Bidang Anggaran 2. Kepala Bidang Aset 3. Kepala Bidang Pendapatan 4. Kasubbid Aset Bergerak 5. Kasubbid Pelaporan 6. Kasubbid Belanja Pegawai
XI.	Kelompok Kerja Perizinan :	
	Ketua	: Kepala Dinas PMPTSP Kab. halbar
	Anggota	: Pranata Komputer
XII.	Kelompok Kerja Pengawasan APIP :	
	Ketua	: Irban I
	Anggota	: 1. Irban II 2. Irban III

XIII. Kelompok Kerja Manajemen ASN :

Ketua : Kepala BKD Kab. Halbar

Anggota : Sekretaris BKD Kab. Halbar

XIV. Kelompok Kerja Tata Kelola Keuangan Desa :

Ketua : Kepala DPMPD Kab. Halbar

Anggota : Sekretaris DPMPD Kab. halbar

PEJABAT	PARAF
Sekertaris Daerah.	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	
Kepala BPKD	
Kabag Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG